

## REKAYASA POLITIK IDEOLOGIS HTI DALAM MASYARAKAT ISLAM INDONESIA

Lau Han Sein<sup>1</sup>, Nurul Atik Hamida<sup>2</sup>, Siti Khulasoh<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup> Pendidikan Agama Islam, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

<sup>2</sup>Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

[lau.han@fai.unsika.ac.id](mailto:lau.han@fai.unsika.ac.id) , [nurulhamida25@gmail.com](mailto:nurulhamida25@gmail.com) , [siti.khulasoh@fai.unsika.ac.id](mailto:siti.khulasoh@fai.unsika.ac.id)

### INFO ARTIKEL

#### Riwayat Artikel:

Diterima: 13/02/2025

Disetujui: 01/03/2025

Dipublikasikan:  
01/03/2025

#### Kata Kunci:

Hizbu Tahrir  
Indonesia,  
Khilafah  
Islamiyah,  
Rekayasa Politik  
Ideologis

**Abstract:** This study aims to analyze the ideological political engineering carried out by Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) within the Indonesian Muslim society. HTI, as an organization advocating for the establishment of an Islamic caliphate, adopts a political approach distinct from other Islamic organizations in Indonesia. This research explores how HTI constructs an ideological narrative that has been accepted by a segment of Indonesian Muslims and its impact on political thinking within society. The ideological engineering approach employed by HTI is conducted through preaching, publications, and a well-organized structure, which has influenced the political and social perceptions of its followers. Using a qualitative approach and political ideology theory, this study analyzes the content of HTI's preaching materials, the media used, and societal responses to HTI's ideology. The results of this study show that HTI has successfully created a deep ideological political awareness among a portion of society, despite challenges related to acceptance and conflicts with Indonesia's nationalism ideology. This research also examines the implications of HTI's movement on the dynamics of Islamic politics in Indonesia and the potential friction between the caliphate ideology and the existing democratic system.

**Abstrak:** : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekayasa politik ideologis yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam masyarakat Islam Indonesia. HTI sebagai sebuah organisasi yang memperjuangkan tegaknya khilafah Islamiyah, memiliki pendekatan politik yang berbeda dengan organisasi-organisasi Islam lainnya di Indonesia. Penelitian ini menelusuri bagaimana HTI membentuk narasi ideologis yang diterima oleh sebagian umat Islam di Indonesia serta dampaknya terhadap pola pikir politik masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam rekayasa ideologis HTI adalah melalui dakwah, publikasi, dan organisasi yang terstruktur dengan baik, yang berhasil mempengaruhi persepsi politik dan sosial di kalangan pengikutnya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teori politik ideologi, penelitian ini menganalisis materi dakwah, media yang digunakan, serta respon masyarakat terhadap ideologi HTI. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa HTI berhasil menciptakan kesadaran politik ideologis yang mendalam pada sebagian masyarakat, meskipun ada tantangan dari segi penerimaan dan konflik dengan ideologi nasionalisme Indonesia. Penelitian ini juga menggali implikasi dari gerakan HTI terhadap dinamika politik Islam di Indonesia serta potensi gesekan antara ideologi khilafah dengan sistem demokrasi yang ada.

## PENDAHULUAN

Hizbut Tahrir adalah partai politik yang berideologi Islam. Politik merupakan aktifitasnya dan Islam adalah mabda-nya. Partai ini bergerak di tengah umat dan bersama

**How to Cite:** Lau Han Sein, Nurul Atik Hamidah, Siti Khulasoh (2025). Rekayasa Politik Ideologis HTI Dalam Masyarakat Islam Indonesia. Qolamuna: Keislaman, Pendidikan, Literasi dan Humaniora, 1(2).

sama mereka berjuanga untuk menjadikan Islam sebagai perkara utamanya, serta mengajak dan membimbing umat Islam berenergi keras untuk mendirikan kembali sistem khilafah dan menegakkan hukum Islam reduksi, yang harus dibumikan diseluruh penjuru dunia (Syah & Setia, 2021).

Kelompok ini merupakan kelompok poltiik bukan kelompok yang hanya berdasarkan kerohanian semata, bukan lembaga ilmiah, bukan lembaga pendidikan (akademis) dan bukan lembaga sosial partai ini didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani sebagai sebuah upaya untuk menciptakan ideologi alternatif dalam rangka memenuhi seruan Allah yang berbunyi :“ (Dan) hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan (Islam), menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, mereka orang-orang yang beruntung (yang akan masuk surga) (Rikza, 2020).

Ayat di atas ditafsirkan oleh Hizbut Tahir sebagai bentuk dan perintah yang ditujukan kepada seluruh umat manusia guna menyebarkan pesan-pesan Tuhan yang berupa kebaikan dan mencegah perbuatan yang mengarah dan kejahatan, kebencian dan kemungkaran. Sejatinya, ayat ini sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh manusia sebagai konsekuensi logis dari fungsi manusia khilafah fi Al Ardhi. Disisi lain ayat ini mengindikasikan agar dilakukannya perintah Tuhan itu bersama suatu kelompok. Artinya Allah mewajibkan kaum muslimin agar diantara mereka ada sekelompok orang yang membentuk suatu jama'ah, dan jama'ah itu oleh Hizbut Tahrir dipahami sebagai partai politik (Muhammadin, 2016).

Dalam konteks ini partai politik yang dimaksud adalah partai Islam. Artinya partai yang berasaskan aqidah, mengambil dan menetapkan ide yang Islami. Oleh karena itu partai Islam, ideologi (mabda) yang dibangunnya juga ideologi Islam. Hizbut Tahrir memahami ideologi sebagai langkah awal atau kekuatan dasar Islam keseluruh relung relung kehidupan. Manurut partai ini, mabda adalah aqidah aqliyah yaitu pemikiran menyeluruh tentang alam semesta, manusia, dan hidup serta tentang apa yang ada sebelum dan sesudah kehidupan yang dapat melahirkan peraturan (Muazaroh, 2019).

Sebagai bentuk aplikasi dari ayat Tuhan di atas yang telah diikat kedalam ideologi Islam. Hizbut Tahrir bermaksud melakukan rekonstruksi pemahaman terhadap konsep-konsep Islam yang dijadikan sebagai landasan Dakawah Islam, sehingga umat Islam bebas dari ide, sistem pandang undangan dan hukum-hukum kufur serta membebaskan mereka dari hegemoni dan negara jafir. Kelompok ini berpandangan bahwa, masyarakat dewasa ini acapkali terpengaruh oleh ideologi – ideologi kafir yang secara bertahap akan menggerogoti nilai-nilai Islam seperti kapitalisme dan sosialisme (Aswar et al., 2020).

Berdasarkan pendangan ini Agama dianggap sebagai candu uang meracuni masyarakat dan mengganggu pekerjaan, karena bagi kaum sosialis tidak ada sesuatu yang berwujud, kecuali hanya materi, bahkan berpikir pun merupakan cermin retak dari materi yang masuk kedalam otak. Ide dasar dari paham ini adalah materi sebagai pangkal berpikir

dasn segala sesuatu berproses dan berkembang dengan sendirinya lalu mewujudkan segala sesuatu. Secara substansial ide ini menurut Hizbut Tahrir menginginkan adanya sang pencipta dan menganggap materi itu bersifat azali (Gunawan, 2022).

Kedua mabda di atas berbeda pendapat dalam melihat individu dan masyarakat. Kapitalisme adalah mabda individualis yang berpendapat bahwa masyarakat terbentuk dari individu. Darisnilah kebebasan individu diprioritaskan. Dan kekuatan terletak pada individu bukan pada negara. Sosialisme termasuk komunisme memandang masyarakat sebagai satu kesatuan yang menyeluruh yang terdiri dari manusia dengan alam. Menurut kaum ini masyarakat terbentuk dari keadaan geografis, pertumbuhan penduduk dan solidaritas mereka serta alat produksi. Dengan demikian ide pokok dari mabda ini adalah dialektika materialisme dan evolusi materialisme (Syah & Setia, 2021).

Hizbut Tahrir mengklaim bahwa dari kedua paham di atas dikonstruksi oleh ideologi kafir yang dalam konteks pemikiran, aqidah dan amaliah bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Melalui kegelisahan inilah Hizbut Tahrir lahir sebagai partai politik yang berideologi Islam dan sebagai penyelamat kehidupan umat manusia. Ideologi Islam yang diyakini oleh Hizbut Tahrir adalah ideologi yang menerangkan bahwa dibalik fenomena alam semesta, manusia dan kehidupan terdapat Al-Khaliq yang menciptakan segala sesuatu yaitu Allah SWT. Allah dalam pendangan ini diposisikan sebagai sutradara jagat raya ini, sehingga apa yang terjadi selalu melibatkan peran Allah. Asas dasar mabda ini adalah keyakinan akan adanya Allah SWT. Aqidah inilah yang menentukan aspek rohani yang terdapat dalam manusia, alam dan kehidupan (Rohmaniyah, 2020).

Dalam konteks penjagaan, pengaturan masyarakat, bukan ditentukan oleh manusia, akan tetapi berasal dari perintah Allah dan larangannya, sehingga aturan ini menjadi aturan yang baku, statis, dan absolut karena wilayah ini merupakan wilayah sakralitas Tuhan yang tidak bisa disentuh dan dicampuri oleh kepentingan dan kekuasaan manusia. Oleh karena wilayah sakralitas Tuhan, pelestarian eksistensi manusia, menjaga akal, kehormatan, jiwa, pemilikan individu Agama dan negara adalah konsep utama yang sudah baku, tidak akan pernah berubah dan berkembang. Secara implisit dan eksplisit, tersirat dan tersurat, sejarah Hizbut Tahrir dihiasi dengan ketidak puasan terhadap konsep modernitas yang kerap melahirkan ideologi kafir (sekularisme) (Manik & Hasanuddin, 2018).

Berdasarkan asas dasar partai politik Hizbut Tahrir yaitu ideologi Islam, kelompok ini mempunyai tujuan melangsungkan kehidupan Islam, dan mengembangkan dakwah keseluruhan penjuru dunia. Artinya mengajak kaum muslim untuk kembali hidup secara Islami di Darul Islam (negara Islam) dan dalam masyarakat Islam. Paham ini menjadikan halal haram sebagai pusat perhatiannya dalam mengembangkan amanah Allah yang berada dibawah naungan Daulah Islamiyah, yaitu Daulah Khilafah. Disisi lain Hizbut Tahrir bertujuan guna membangkitkan kembali umat Islam dengan kebangkitan yang benar melalui pola pikir yang cemerlang (excellence) (Gunawan, 2022).

Hizb berusaha untuk mengembalikan posisi ummat kembali kejayaan kemuliannya, mengambil alih kendali negara negara bangsa di dunia dan agar kembali menjadi negara Super Power di dunia seperti yang telah terjadi di masa silam, dan memimpinnya sesuai hukum Islam dan Qiyadah Fikriyah. Angan angan yang menjadi tujuan utama dalam merefleksikan nilai-nilai ideologis di atas, harus segera terealisasi dan diserap oleh individu, dan masyarakat. Kelompok ini melihat bahwa untuk merubah sistem yang berada dimasyarakat yang telah dianggapnya sebagai sistem kufur harus diawali dengan cara merubah sistem negara yaitu dengan membentuk Daukah Islamiah. Sistem negara ini dipimpin oleh seorang khilafah yang dipilih melalui bai'at, karena menurut paham ini tidak pernah ada dalam sepanjang sejarah yang mengangkat khalifah dengan sistem "putra mahkota" (Kurdi, 2013).

Khilafah yang dipilih melalui bai'at dalam pandangan Hizbut Tahrir merupakan unsur yang harus ada dalam Qiyadah Fikriyah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Qiyadah Fikriyah oleh Hizbut Tahrir dianggap berhasil mengubah bangsa Arab secara keseluruhan dari taraf pemikiran yang sangat rendah, dan dari kegelapan yang selalu diliputi oleh fanatisme kesukuan dan alam kebodohan yang sangat menjadi era kebangkitan berpikir yang cemerlang gemerlap dengan cahaya Islam, yang bahkan tidak hanya untuk bangsa Arab tetapi untuk seluruh dunia. Dari sini dapat kita lihat bahwa yang menjadi problem utama masyarakat islam Indonesia kontemporer, bukanlah menegakkan persoalan tauhid tetapi bagaimana caranya mendirikan khilafah Islamiah, bahkan mereka memberikan limitasi hanya pada masalah ini, bukan pada masalah yang lain. Dalam hal ini, HTI mencoba menggunakan ideologis keagamaan sebagai alat untuk menyebarkan paham politiknya di Indonesia. Maka dari itu dalam penelitian ini penulis mencoba untuk meneliti tentang pemikiran politik ideologis HTI dalam masyarakat islam Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis isi (*content analysis*). Teknik ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pola, tema, serta makna yang terkandung dalam berbagai literatur yang dijadikan sebagai sumber data penelitian (Saefullah, 2024). Untuk keperluan ini, data dikumpulkan melalui studi literatur, wawancara mendalam dengan pengamat politik, akademisi, serta anggota atau mantan anggota HTI. Selain itu, penelitian ini juga melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen dakwah, buku, dan publikasi resmi yang diterbitkan oleh HTI untuk memahami doktrin ideologis yang disebarluaskan. Proses analisis dilakukan dengan memetakan pola-pola rekayasa ideologis yang digunakan oleh HTI dalam menyebarkan gagasan khilafah dan menghubungkannya dengan respon yang ditunjukkan oleh masyarakat Islam Indonesia. Hasil wawancara dan data dari dokumen kemudian dianalisis dengan menggunakan teori politik ideologi dan teori sosial untuk mengidentifikasi pengaruh ideologis HTI dalam masyarakat.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hizbu Tahrir**

Hizbut Tahrir pertama kali didirikan oleh Taqiyuddin al-Nabhani (1909-1977), bersama Dawud Hamdan, dan Namr al-Mishrim yang berasal dari Al-Quds, Palestina. Gerakan Islamisme ini menginginkan tegaknya sistem khilafah agar bisa membebaskan Palestina dari jajahan Barat dan kemudian melaksanakan hukum Islam di seluruh dunia (Kurdi, 2013). HT mengajukan izin atas berdirinya partai politik namun mendapat penolakan dari Departemen Dalam Negeri Pemerintah Yordania, namun tak disetujui karena dipandang ilegal. Setelah Taqiyuddin al-Nabhani meninggal (1977 M), lalu kepemimpinan HT dilanjutkan oleh Abd' al-Qadim Zallum hingga tahun 2003, kemudian dilanjutkan oleh Abu Rashtah hingga saat ini (2011). Kegiatan utama dari Hizbut Tahrir adalah ideologi Islam dan politik. Adapun agenda dari Hizbut Tahrir adalah membangkitkan kembali sistem Khilafah Islamiyah dan menegakan segala hukum Islam dalam realitas kehidupan. Cita-cita untuk membangun sistem politik dan tatanan masyarakat yang berdasarkan landasan aqidah Islam untuk bisa diterapkan dalam undang-undang dan dasar konstitusi (Aswar et al., 2020).

Konsep politik HT yang keras dan menolak gagasan yang lebih moderat menjadikan organisasi ini sebagai organisasi terlarang di beberapa negara seperti Yordania, Tunisia, dan Mesir. HT tercatat pernah melakukan kudeta di Yordania pada tahun 1969 dan 1971, di Irak pada tahun 1976, di Mesir tahun 1974 dan di Tunisia pada tahun 1970-an. Meski pun demikian, menurut laporan dari Heritage Foundation, HT aktif di 40 negara di berbagai belahan dunia. HT aktif beroperasi di wilayah Timur Tengah, Afrika, Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan di negara-negara Barat (Rikza, 2020).

Secara garis besar, Agenda yang di emban oleh Hizbut Tahrir, yakni melanjutkan kehidupan Islam dan mengembangkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tinjauan ini berarti mengajak kaum muslim kembali hidup secara Islami dalam daulah Islam, di mana seluruh kegiatan kehidupannya oleh aturan Islam. HT mempunyai pemahaman bahwa hukum yang dibuat tidak berdasarkan Al Quran dan Hadist adalah kufur. HT juga mengharamkan ideologi yang dibuat oleh manusia seperti demokrasi, nasionalisme, Pancasila, marxisme, komunis dan lain sebagainya (Manik & Hasanuddin, 2018).

Selain itu juga bertujuan membebaskan umat-umat dari berbagai macam ide yang berasal dari Barat, sistem perundang-undangan yang bukan berasal dari Islam, serta keinginan membangkitkan uamta Islam dari kemerosotan. Selain itu juga cita-cita mereka mendirikan Daulah Khilafah Islamiyah diseluruh dunia dengan mempercayai bahwa hukum Islam dapat dilaksanakan. Hizbut Tahrir Kemudian menyebar ke berbagai negara melalui berbagai macam proses negosiasi dan dialog dengan segala identitas budaya lokal, sebagai sebuah gagasan mengenai Islam transnasional menemukan rasionalitasnya. Hal tersebutlah yang pada akhirnya membentuk doktrin negara khilafah sebagai sebuah

panggilan persatuan solidaritas untuk bisa melawan tirani Israel. Format pemerintahan khilafah sebelumnya juga sudah ada namun telah mati seiring jatuhnya Turki Usmani tahun 1924 (Mahmudin, 2021).

## Hizbut Tahrir Indonesia

Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada awal tahun 1980-an yaitu pada masa Orde Baru. K.H. Abdullah bin Nuh, seorang ulama, tokoh pendidikan, sastrawan dan pejuang, bertemu dengan Abdurrahman al-Baghdadiy di Australia saat Abdurrahman al-Baghdadiy sedang memberikan ceramah tentang kewajiban menegakkan khilafah dan persatuan umat. K.H. Abdullah bin Nuh mengajaknya ke Indonesia untuk tinggal di bogor dan mulai melakukan dakwah untuk memperkenalkan Hizbut Tahrir ke berbagai pesantren dan kampus-kampus di Indonesia seperti di kampus Al-Ghfari, IPB Bogor, kemudian membentuk sebuah pengajian-pengajian kecil untuk mengeksplorasi gagasan-gagasan Hizbut Tahrir (Syah & Setia, 2021).

HTI kemudian menyebar ke kampus-kampus di luar bogor seperti Unpad, IKIP Malang, Unair, Unhas dan kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Massa HTI kebanyakan dari kalangan intelektual khususnya mahasiswa teknik, bahasa, maupun pelajar dari sekolah umum. Juru bicara HTI, Ismail Yusanto, mengatakan bahwa HTI cukup kuat di kampus IPB, UGM, UNAIR, ITB, UNPAD, IKIP, dan UI (Sareh & Nawawi, 2022).

Seperti halnya gerakan Tarbiyah, HTI mengalami penyebaran secara pesat melalui komunitas mahasiswa yang berjejaring dalam dakwah kampus. Namun pada masa rezim Soeharto, HTI menjadi gerakan bawah tanah (clandestine) hingga tumbangnya Rezim Orde Baru. Pergerakan politik HTI dilakukan secara diam-diam. HTI melakukan dakwah dari masjid ke masjid, dari rumah ke rumah dan di kampus-kampus dengan membentuk jaringan dakwah kampus. Hal ini disebabkan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) yang melarang aktivitas politik mahasiswa (Rohmaniyah, 2020).

Pada tahun 1998 ketika Soeharto dilengserkan oleh gerakan reformasi, terjadi perubahan konstelasi politik, yakni era keterbukaan yang ditandai dengan amandemen UUD 1945 Pasal 28E ayat 3 menyatakan dengan tegas bahwa setiap warga negara bebas untuk berpendapat dan bebas untuk berserikat dan berkumpul. Hal ini membuka peluang bagi organisasi-organisasi yang lama terkungkung oleh rezim Soeharto untuk mulai menampakkan statusnya termasuk Hizbut Tahrir (Muazaroh, 2019).

Hizbut Tahrir Indonesia resmi melakukan aktifitasnya di Indonesia secara terbuka sejak tahun 2000. Hizbut Tahrir dalam konteks Indonesia kemudian dikenal dengan nama Hizbut Tahrir Indonesia kemudian disingkat dengan HTI yang diketuai oleh Hafidz Abdurrahman. HTI dalam deklarasinya menyebutkan diri mereka adalah sebuah partai politik tapi mereka merupakan organisasi masyarakat yang terdaftar di Kementrian Dalam Negeri dengan Nomor 44/D.III.2/VI/2006 (Marfiando, 2020).

Pada era pasca reformasi, gerakan politik HTI di Indonesia dapat dikatakan lebih leluasa dibandingkan ketika era Orba. Hal ini terbukti dengan berbagai macam kegiatan yang telah diadakan oleh HTI dalam mengampanyekan sistem khilafah seperti, diskusi, temu tokoh, muktamar, konferensi, pelatihan, pembinaan dan pengkaderan. Contoh kegiatan yang paling besar adalah Konferensi Khilafah dan Jakarta International Conference of Muslim Intetectual (JICMI) (Arif, 2016).

Aktivitas kegiatan HTI secara keseluruhan adalah kegiatan yang bersifat politik, baik sebelum maupun sesudah mengambil alih kegiatan di luar hukum pemerintahan ataupun yang menyangkut pemerintahan. Politik menurut HTI adalah mengatur dan memelihara urusan rakyat sesuai dengan hukum-hukum dan pemecah Islam. Kegiatannya bukan dalam aspek pendidikan seperti madrasah. Seruannya tidak hanya bersifat nasihat-nasihat dan petunjuk-petunjuk, akan tetapi kegiatannya bersifat politik, dengan cara mengemukakan fikrah-fikrah Islam serta hukum-hukumnya untuk dilaksanakan dan diwujudkan dalam kenyataan hidup dan pemerintahan (Arif, 2016).

Kegiatan HTI mengembangkan dakwah Islam untuk mengubah situasi masyarakat yang mereka anggap rusak menjadi masyarakat Islam, mendidik dan membina masyarakat dengan kebudayaan Islam, meleburnya dengan Islam, membebaskannya dari aqidah-aqidah yang rusak dan pemikiran-pemikiran yang salah dan keliru serta membebaskannya dari pengaruh ide-ide dan pandangan-pandangan kufur. Aktivitas politiknya juga terlihat dalam aspek pergolakan pemikiran dan dalam perjuangan politiknya di Indonesia (Zulfadli, 2018).

Pergolakan pemikirannya disini terlihat dalam penentangannya terhadap ide-ide dan aturan-aturan yang kufur disertai dengan penjelasan hukum Islam dalam masalah tersebut. Sedangkan perjuangan politiknya terlihat dalam penentangannya terhadap imperialis kafir untuk memerdekakan umat dari belenggu kekuasaannya, membebaskan umat dari tekanan dan pengaruhnya, serta mencabut akar-akar yang berupa pemikiran, kebudayaan, politik, ekonomi maupun militer dari seluruh negeri-negeri Islam termasuk Indonesia (Aswar, 2022).

Gerakan politik HTI berfokus pada bagaimana membangun kesadaran politik masyarakat untuk menerapkan hukum-hukum Allah yang berupa syariat Islam. HTI menganggap syariat Islam sebagai solusi terbaik dalam mengatasi segala problem hidup masyarakat. Gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan Hizbut Tahrir dianggapnya bersinonim dengan gerakan politik. Hal ini disebabkan karena politik merupakan bidang yang mengatur kehidupan bermasyarakat (Romario, 2019).

Hizbut Tahrir sukses melakukan gebrakan besar pada tahun 2002 dengan menggelar konferensi internasional Khilafah Islamiyah di Senayan Jakarta. Acara tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh Hizbut Tahrir internasional dan Nasional, organisasi Islam dan organisasi lain, juga dihadiri lebih dari 5000 orang.

Dengan terselenggarakannya konferensi internasional tersebut, maka HTI kini resmi untuk melakukan aktivitasnya di Indonesia secara terbuka. Kesuksesan acara tersebut dilanjutkan dengan kegiatan aksi demo dalam menentang penyerangan Amerika Serikat terhadap Afghanistan. Gerakan Hizbut Tahrir di Indonesia semakin mengemuka ketika berhasil menggelar long march yang diikuti 12.000 kader dan simpatisan, pada sidang tahunan MPR 2002, menuntut penerapan syariat Islam. Kemudian pada tanggal 29 Februari 2004, HTI kembali menggelar long march dari Monas ke Bundaran Hotel Indonesia dengan melibatkan 20.000 anggota dengan agenda penegakkan syariat Islam dan khilafah. Perkembangan pesat HTI di Indonesia bisa dilihat dari kuantitas anggotanya dan identitas kegiatannya di ruang publik seperti dalam bentuk pawai, seminar berskala internasional dan nasional, dialog dan diskusi publik serta proliferasi media di berbagai daerah di tanah air (Kartini, 2015).

Selain itu, HTI berupaya menggiring opini masyarakat melalui media yang dibuatnya berupa media elektronik dan cetak. HTI beranggapan bahwa setiap permasalahan yang terjadi adalah karena sistem negara Indonesia yang sekuler dan penegakkan syariat Islam dan khilafah merupakan solusinya. Penggiringan opini ini dimaksudkan supaya masyarakat bisa mempunyai pemikiran seperti apa yang mereka inginkan dan dapat mendukung mereka untuk menegakkan khilafah (Muqtada, 2018).

Tidak hanya melalui media, dalam melaksanakan ide-ide dan gagasannya HT menggunakan gerakan perebutan kekuasaan. HT berusaha melakukan infiltrasi ke tengah-tengah masyarakat dengan cara menguasai arena-arena strategis dengan cara menguasai sumber daya strategis, diantaranya adalah masjid, kampus, instansi pemerintah dan swasta dan lain-lain (Azman, 2018).

Hingga sekarang HTI selalu lantang menyuarakan penentangannya terhadap ide-ide yang mereka anggap merupakan persepsi-persepsi yang salah dan keliru. HTI beraksi dengan menjelaskan kerusakan dan menampakkan kekeliruan persepsi tersebut dan menjelaskan ketentuan hukum Islam dalam masalah tersebut. Mereka berhasil merangkum semua kajian yang ada hubungannya dengan permasalahan masyarakat disertai dengan solusi pemecahannya dalam bentuk selebaran, booklet, majalan maupun buku.

## **Rekayasa Politik Ideologis HTI**

Tujuan prioritas diadakannya Hizbut Tahrir Indonesia dan dirumuskannya konsep Dakwah Islamiyah adalah menyebarkan syariat Islam pada masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Mereka berkeyakinan bahwa syariat yang dipahaminya benar sesuai dengan apa yang digariskan oleh Tuhan. Tujuan ini marilah kita kaji secara kronologis. Munculnya penegakan syariat Islam berawal dari bengkitnya semangat ijihad yang telah lama terkubur. Semangat ijihad itu lahir dari adanya pendominasian ideologi kafir terhadap dunia dan harus ditegakkan tanpa mempertimbangkan pengaruhnya terhadap hak-hak dan kesejahteraan kelompok lain. Jalan lurus telah dipastikan kata mereka oleh “sistem

hukum Tuhan” (Syariah) yang menghapus semua pertimbangan moral atau nilai-nilai etis yang sepenuhnya tidak terdapat dalam hukum (Azmy, 2020).

Dalam pandangan ini Agama seolah hanya untuk kepentingan Tuhan belaka, dan manusia dipandang sebagai objek pelampiasan kekuasaan Tuhan yang tak berdaya tak diperhitungkan. Pernyataan ini merupakan logika terbalik dalam memahami Agama, karena Tuhan menciptakan Agama untuk manusia bukan Tuhan, jadi kesejahteraan manusialah sebenarnya yang menjadi tujuan Agama. Hal ini senada dengan pernyataan Gusdur bahwa “Tuhan Tidak Perlu Dibela”, karena Tuhan mampu menjaga dirinya sendiri tanpa bantuan manusia (Karman, 2016).

Dengan demikian proyek umat Islam saat ini adalah menyelesaikan problematika umat Islam, bukan malah manambah persolalan kemanusiaan, dan menjadikan Islam sebagai “penyejuk jiwa”, bukan sebagai “bara api” yang dapat menghancurkan kehidupan manusia. Maka dari itu tegaknya syariat Islam adalah wujud ketidak berdayaan umat Islam dalam menghadapi masalah yang menghimpit mereka dan menyelesaikan dengan cara mendalam secara rasional.

Kalau kita analisa lebih mendalam, Islam dengan syariat Islam berbeda. Islam adalah sesuatu yang datang langsung dari Tuhan yang masih berupa ide Personal Tuhan, sedangkan syariat Islam adalah produk budaya lokal. Dikatakan budaya lokal karena aturanaturan Tuhan disampaikan kepada masyarakat Arab sesuai dengan fenomena yang terjadi. Misalnya, larangan zina, larangan ini disampaikan karena pada waktu itu banyak orang Arab yang melakukan zina, dan apabila pada waktu itu tidak ada fenomena zina maka tidak akan ada larangan zina.

Logika ini sejalan dengan pernyataan Hassan Hanafi bahwa “realitas mendahului pemikiran dan pemikiran perlu menyesuaikan dengan realitas”. Logika di atas ketika digunakan untuk mengkaji Tuhan akan melahirkan pernyataan bahwa Tuhan ada karena manusia berpikir tentangnya, ketika manusia tidak berpikir tentang Tuhan maka Tuhan tidak akan pernah ada. Oleh sebab itu “manusia berpikir Tuhan pun tertawa”. Potret kronologis penegakan syariat yang baru saja kita lakukan mengisyaratkan bahwa konsep tersebut secara terselubung menyelendupkan dan mewakili nilai-nilai budaya Arab, untuk diletakkan di bumi Indonesia multikultural. Dari sini dapat kita tangkap bahwa adanya rekayasa dan rekadaya oleh kelompok dominan untuk menguasai budaya Indonesia beserta ideologinya. Dan telah terjadi pemaksaan, truth claim terhadap budaya orang lain (baca: Indonesia) (Karman, 2016).

Fenomena ini apabila kita hadapkan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang multikultural sangatlah bertolak belakang, karena realisasi konsep dakwah Hizbut tahrir Indonesia mengingkari nilai-nilai penghargaan, pengakuan dan toleransi terhadap keanekaragaman budaya khususnya budaya Indonesia. Jadi, apabila konsep dakwah Hizbut Tahrir Indonesia tetap merajalela di bumi ini niscaya tidak lama kemudian akan

terjadi benturan kebudayaan atau meminjam istilah Imam Ali Khamene'i adalah perang kebudayaan yang dalam hal ini budaya Islam Arab vs Islam Indonesia.

Setelah melakukan eksplorasi singkat terhadap gerakan dakwah Islam kontemporer (HTI), langkah selanjutnya adalah melakukan pembongkaran politik ideologis yang berada dalam gerakan dakwah Islam kontemporer. Tujuan dari pemabahasan ini ingin mengetahui bagaimana HTI memainkan peran dalam melakukan rekayasa politik terhadap Islam yang diyakini sebagai ideologinya. Berbicara tentang politik ideologis berarti kita akan melakukan lukisan mendalam meminjam istilah Gilbert Ryle terhadap strategi praktik ideologis yang dilakukan oleh gerakan dakwah Islam kontemporer. Gerakan dakwah Islam kontemporer memiliki ideologi Islam, yang berlandaskan pada alqur'an dan sunnat nabi. Sesuatu yang dianggap menyimpang dari Islam yang dia pahami harus diluruskan dan disingkirkan. Mereka kerap kali menghadirkan praktik dakwah rasul, sahabat dan masa pencerahan Islam kedalam konteks Indonesia (Manik & Hasanuddin, 2018).

Ketika Islam dijadikan ideologi oleh HTI secara tidak langsung Islam sebagai pesan ketuhanan telah memasuki wilayah ideologis yang didalamnya tersimpan kepentingan dan kekuasaan. Melalui wilayah inilah Islam tidak lagi hadir melainkan pemahaman ke Islam anlah yang mewarnainya. Islam ideologis yang diperjuangkan dan disebarluaskan oleh HTI sebenarnya terbentuk secara oposisional dan tuntutan, day dream kolektif, dan halusinasi individual yang tidak membawa pengikutnya pada Islam sebagai agama melainkan semata mata mengajak pada kemampuan setiap ideologi besar dalam mengerakkan fantasi kolektif, menyuburkan dan menyalakan api semangatnya (Sareh & Nawawi, 2022).

Kegelisahan dan kebencian yang lahir dari HTI terhadap pemerintah, sistem pemerintahan kafir yang membelenggu masyarakat Islam ditanamkan secara samar dan mewarnai sistem dakwah yang digunakannya. Secara implisit masyarakat diajak untuk membenci pemerintah dan sistemnya yang tidak berlandaskan Islam dengan berkedok dibawah naungan panji panji Islam. Di antara salah satu panji Islam yang dikumandangkan adalah yel yel jihad. Mereka mengajak dan meyakinkan umat Islam untuk berjihad dijalanan Allah dengan menumpas segala bentuk kemungkaran, dan merubah sistem pemerintahan non Islam dengan sistem pemerintahan Islam. Umat Islam yang tidak kritis terhadap retorika yang disampaikannya akan menimbulkan gairah yang luar biasa dalam melakukan jihad (Hatta & Abdullah, 2017).

Politik yang digunakan oleh kelompok HTI, adalah politik kaum dominan. Artinya mereka memanfaatkan kuantitas muslim Indonesia yang secara ,mayoritas memiliki posisi dominan dibanding agama yang lain. Melalui dominasi inilah gerakan dakwah Islam kontemporer semakin mempunyai kekuatan massa yang bersama sama menjalankan misi ideologinya. Saat ini HTI semakin berani menampakkan taringnya, menyebar luas dari sabang sampai merauke. Tidak hanya diperkotaan bahkan telah menjalar kepedesaan.

Penyampaian pesan dakwah tersebut tidak bersifat searah tapi dari pelbagai arah. Ada yang menempati posisi struktur pemerintahan yang dalam hal ini di legislatif, ada pula yang bergerak di wilayah lembaga kemasyarakatan, advokasi kemasyarakatan, dan bergerak di wilayah media massa. Masing masing posisi ini mempunyai satu tujuan yaitu menegakkan agama Allah, menerapkan syariat Islam bahkan mendirikan negara Islam. Menurut amatan penulis, starategi politik dominan yang dilakukan oleh HTI berawal dari pembacaan normatif dan tekstualis terhadap alqur'an dan sunnat nabi. Mereka tidak melibatkan konteks historis dalam melakukan pembacaan, dan kerap kali melakukan pembacaan tunggal terhadap tradisi yaitu hanya tradisi nabi dan sahabatlah yang bisa kita jadikan cerminan dan tauladan (Zulfadli, 2018).

Kalau kita melihat sesuatu yang ada didunia ini pasti tidak bisa kita lepaskan dengan konteks sejarah, begitu juga alqur'an dan sunnat nabi. Alqu'an dan hadis memiliki konteks sejarah Arab, karena dia diturunkan dan dipraktekkan pertama kali di dunia Arab. Sejarah dalam hal ini memang mempunyai pengaruh besar dalam menetukan pemahaman seseorang, karena sejarah adalah kisah tentang siapa yang berkuasa, dan bagaimana mereka menjadi berkuasa, lalu bagaimana mereka menggunakan kekuasaan agar tetap berada dalam posisi yang membuat mereka bisa terus mendominasi bangsa lain (Syah & Setia, 2021).

Eksistensi dan keberhasilan dakwah nabi sangat ditentukan oleh sejarah kekuasaan pada waktu itu. Artinya bagaimana nabi merebut kekuasaan bangsa jahiliyah dimakkah, bagaimana nabi merebut kekuasaan di madinah. Tentunya setelah melakukan perebutan ini bagaimana nabi bisa meraih kekuasaan, dan bagaimana pula nabi menggunakan kekuasaan. Pelajaran berharga dari konteks sejarah ini dilupakan dan dilampau oleh HTI, mereka hanya senang dan girang mengambil dan mencontoh praktik dakwah nabi dan sahabat, namun mereka lupa melihat bagaimana, kekuasaan, sejarah, dan kondisi masyarakat pada waktu itu. Kemudian dengan kegirangannya pula mereka dengan mudah menerapkan dakwah nabi secara taken for granted di negara Indonesia tanpa melihat kondisi masyarakat Indonesia. Misalnya dapat kita lihat kemenangan masyarakat madinah melawan masyarakat mekkah. Kemenangan ini berawal dari strategi nabi dalam melakukan politik wacana guna merangsang dan memberikan semangat membara bagi masyarakat madinah (Zulfadli, 2018). Dengan kecerdasan dan pembacaan nabi yang cemerlang terhadap kondisi masyarakat, dalam mengajak masyarakat madinah untuk melakukan perlawanan terhadap makkah, nabi tidak membawa panji panji Islam melainkan membawa panji panji negara. Artinya nabi tidak mengajak rakyat madinah untuk kebangkitan Islam melainkan mengajaknya untuk kebangkitan kota Madinah. Dengan demikian seluruh rakyat madinah dengan semangat bersatu walaupun terdapat berbagai macam perbedaan, agama, budaya dan ras melakukan perlawanan terhadap Makkah sehingga pada saat itu detik detik kemenangan mengenangi kota Madinah (Shobron, 2016).

Potret dakwah Nabi ini, bertolak belakang dengan HTI, Gerakan dakwah Nabi bersifat patriotik, dan nasionalis, sedangkan gerakan HTI bersifat Islami dan Arabis. Gerakan yang pertama bersifat kontekstual dan gerakan yang kedua bersifat a kontekstual atau yang pertama bersifat historis dan yang kedua bersifat a historis. Berbicara tentang keberhasilan dakwah, tentunya strategi politik wacana yang dilakukan Nabi lebih dapat diterima oleh masyarakat karena beliau memperhatikan keanekaragaman kepercayaan, dan kebudayaan masyarakat setempat dibanding strategi politik dominan dengan berstereotip Islam yang dipraktekkan oleh HTI karena tidak memperhatikan keaneka ragaman kepercayaan, agama, dan budaya bangsa Indonesia (Hilmy, 2014).

Dari diskripsi dan analisa tentang Gerakan HTI di atas, politik ideologis yang bisa diungkap oleh penulis terdiri dari pelbagai tesis. Pertama, pesan dakwah yang disampaikan merupakan dakwah kebencian terhadap pemerintah dan sistem pemerintahan yang berideologikan di luar Islam. Kedua, jihad yang menjadi pegangan dalam menyampaikan pesan Islam merupakan kekerasan simbolik yang pada akhirnya akan melahirkan kekerasan destruktif. Ketiga, Pesan keagamaan yang disampaikan telah melampaui wacana agama, karena bukan lagi berdasarkan prinsip paradigmatis melainkan terjadi pemaksaan kekuasaan dan ideologi. Dengan demikian dalam merespon perkembangan zaman, pesatnya informasi teknologi, pola pemikiran kritis konteks tual sangat dibutuhkan, agar tidak terjebak kepada praktik praktik politik maupun ideologi.

## SIMPULAN DAN SARAN

Hizbut Tahrir pertama kali masuk di Indonesia sekitar tahun 1980-an, yaitu pada masa Orde Baru yang dibawa oleh K.H. Abdullah bin Nuh dengan memperkenalkan Hizbut Tahrir ke berbagai pesantren dan kampus-kampus di Indonesia seperti di kampus Al-Ghfari, IPB Bogor, kemudian membentuk sebuah pengajian-pengajian kecil untuk mengeksplorasi gagasan-gagasan Hizbut Tahrir.

Kegelisahan dan kebencian yang lahir dari HTI terhadap pemerintah, sistem pemerintahan kafir yang membelenggu masyarakat Islam ditanamkan secara samar dan mewarnai sistem dakwah yang digunakannya. Secara implisit masyarakat diajak untuk membenci pemerintah dan sistemnya yang tidak berlandaskan Islam dengan berkedok dibawah naungan panji panji Islam.

Politik yang digunakan oleh kelompok HTI adalah politik kaum dominan. Artinya mereka memanfaatkan kuantitas muslim Indonesia yang secara mayoritas memiliki posisi dominan dibanding agama yang lain. Melalui dominasi inilah gerakan dakwah Islam kontemporer semakin mempunyai kekuatan massa yang bersama sama menjalankan misi ideologinya.

Ketika Islam dijadikan ideologi oleh HTI secara tidak langsung Islam sebagai pesan ketuhanan telah memasuki wilayah ideologis yang didalamnya tersimpan

kepentingan dan kekuasaan. Melalui wilayah inilah Islam tidak lagi hadir melainkan pemahaman ke Islam anlah yang mewarnainya. Islam ideologis yang diperjuangkan dan disebarluaskan oleh HTI sebenarnya terbentuk secara oposisional dan tuntutan, day dream kolektif, dan halusinasi individual yang tidak membawa pengikutnya pada Islam sebagai agama melainkan semata mata mengajak pada kemampuan setiap ideologi besar dalam mengerakkan fantasi kolektif, menyuburkan dan menyalakan api semangatnya.

Jadi dalam hal ini, HTI melakukan rekayasa terhadap agama islam sebagai alat dalam berpolitiknya, mengingat secara kuantitas mayoritas masyarakat Indonesia adalah seorang muslim sehingga sangat mudah bagi HTI untuk melakukan perekrutan dan pendoktrian tentang kepentingan politiknya.

## DAFTAR REFERENSI

- Arif, S. (2016). Pandangan dan Perjuangan Ideologis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam Sistem Kenegaraan di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 7(1). <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v7i1.1282>
- Aswar, H. (2022). Nationalism Narrative and The State Policy on Hizbut-Tahrir in Indonesia. *Nation State: Journal of International Studies*, 5(2). <https://doi.org/10.24076/nsjis.v5i2.836>
- Aswar, H., Bin Mohd Yusof, D., & Binti Abdul Hamid, R. (2020). The State Response toward the Existence of HTI: An Analysis from Social Movement Study Approach. *JURNAL SOSIAL POLITIK*, 6(2). <https://doi.org/10.22219/sospol.v6i2.12908>
- Azman, A. (2018). GERAKAN DAN PEMIKIRAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 7(1), 99–113. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5329>
- Azmy, A. S. (2020). FUNDAMENTALISME ISLAM: TELAAH TERHADAP PEMIKIRAN POLITIK HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI). *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 5(1). <https://doi.org/10.24198/jwp.v5i1.27997>
- Gunawan, T. (2022). Melacak Pemikiran Gerakan Salafi dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) serta Perang Pemikiran Keduanya di Yogyakarta. *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 23(1). <https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i1.10119>
- Hatta, M., & Abdullah, A. (2017). COMMUNICATION TECHNIQUE OF HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) IN THE DEVELOPMENT OF CADRE IN NORTH SUMATERA. *International Journal on Language, Research and Education Studies*, 1(2), 240–255. <https://doi.org/10.30575/2017091206>
- Hilmy, M. (2014). Akar-akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1). <https://doi.org/10.15642/islamica.2011.6.1.1-13>
- Karman, K. (2016). Frame of Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) as A Fundamentalis Group in the Discourse of Democracy in Online Media. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika*, 6(1).
- Kartini, I. (2015). Hizbut Tahrir Indonesia and the Idea of Restoring Islamic Caliphate. *Masyarakat Indonesia*, 41.
- Kurdi, S. (2013). Transnational Islamic Movement (Studi Gerakan Islam Hizbut Tahrir Indonesia). *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 1(2), 227–244.
- Mahmudin, A. S. (2021). Pengembangan bahan ajar mata pelajaran pendidikan agama islam oleh guru tingkat sekolah dasar. *SITTAH: Journal of Primary Education*, 2(2), 95–106.

- Manik, E. S., & Hasanuddin, H. (2018). Strategi Politik Hizbut Tahrir dalam Menegakkan Khilafah Islam di Indonesia. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 17(1). <https://doi.org/10.24014/af.v17i1.5337>
- Marfiando, B. (2020). Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ditinjau dari Kebebasan Berserikat. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(2). <https://doi.org/10.35879/jik.v14i2.253>
- Muazaroh, S. (2019). Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia Perspektif Maqashid: Otoritas atau Otoritarianisme. *Justicia Islamica*, 16(1). <https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1622>
- Muhammadin, M. (2016). Relevansi Sistem Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Dengan Sistem Negara Islam Modern. *Intizar*, 22(2). <https://doi.org/10.19109/intizar.v22i2.949>
- Muqtada, M. R. (2018). Hadis Khilâfah dan Relasinya terhadap Kontestasi Politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Pasca-Perpu Nomor 2 Tahun 2017. *Mutawatir*, 8(1). <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2018.8.1.1-21>
- Rikza, A. (2020). The Securitization of Hizbut Tahrir Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 5(2). <https://doi.org/10.15294/ipsr.v5i2.21712>
- Rohmaniyah, I. (2020). PERPETUATION OF RADICAL IDEOLOGY: DEPERSONALIZATION AND AGENCY OF WOMEN AFTER THE BANNING OF HIZBUT TAHRIR INDONESIA. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 17(1). <https://doi.org/10.22515/ajpif.v17i1.2361>
- Romario, R. (2019). Hisbut Tahrir Indonesia dalam Ruang Media Sosial Instagram. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 4(1).
- Saefullah, A. S. (2024). Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama dan Keberagamaan dalam Islam. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2(4), 195–211.
- Sareh, N., & Nawawi, A. M. (2022). POWER POLITICS IN THE QURĀN: HIZBUT TAHRIR INDONESIA AND THE CONCEPT OF CALIPHATE IN AL-WA'IE BY ROKHMAT S. LABIB. *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir*, 7(1). <https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v7i1.3889>
- Shobron, S. (2016). MODEL DAKWAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 15(1).
- Syah, M. K. T., & Setia, P. (2021). Radikalisme Islam: Telaah Kampanye Khilafah oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Pra-Pembubaran oleh Pemerintah. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(4). <https://doi.org/10.15575/jis.v1i4.14094>
- Zulfadli, Z. (2018). Orientasi Politik Aktivis Eks Hizbut Tahrir Indonesia Pasca Dibubarkan. *Kontekstualita*, 33(02), 169–189.